



# BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Bupati Mimika selanjutnya disebut Bupati adalah kepala daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Mimika atau Badan yang diserahkan wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Mimika.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
18. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.
19. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB II

### OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. asbes
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite)

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (filler earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarusit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil; dan
  - c. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola oleh perorangan yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) (Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Mimika.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati secara periodik.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25 % (dua puluh persen) dari nilai jual pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

BAB III

HARGA STANDAR BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 7

Nilai pasar atau harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

1. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Penjualan Dalam Negeri diluar Wilayah Kabupaten Mimika

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Sirtu	Rp. 40.000.-	Per m <sup>3</sup>
Pasir	Rp. 75.000.-	Per m <sup>3</sup>
Batu	Rp. 100.000.-	Per m <sup>3</sup>
Tanah	Rp.	Per m <sup>3</sup>

2. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Penjualan Lokal Dalam Wilayah Kabupaten Mimika

BAHAN GALIAN	HARGA STANDAR	KETERANGAN
Sirtu	Rp. 40.000.-	Per m <sup>3</sup>
Pasir	Rp. 75.000.-	Per m <sup>3</sup>
Batu	Rp. 100.000.-	Per m <sup>3</sup>
Tanah	Rp.	Per m <sup>3</sup>

## BAB IV

### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki izin usaha dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan melampirkan:
    - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
    - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
    - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 4) Fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan;
    - 5) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada; dan
    - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
  - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (KNPWP); dan
  - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat.

## BAB IV

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mendapat izin dari Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber daya Mineral, kecuali ditentukan lain.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Mimika.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

## BAB VIII

### SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 11

Untuk usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditetapkan dengan sistem dibayar sendiri.

## BAB IX

### TATA CARA PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) SPTPD diisi Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah pajak yang dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan dengan melampirkan data penjualan, PEB, manifest, audit PT. Scufindo dan Surveyor lainnya.
- (3) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), kecuali ditentukan lain.
- (4) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika sebagai laporan.
- (5) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (6) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD ke Kas Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- (7) Pembayaran pajak pada hari libur dapat diberikan dispensasi dengan menerbitkan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan.
- (8) Bendahara Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada hari libur dapat menyetorkan uang penerimaan pajak pada hari kerja berikutnya.
- (9) Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

## BAB X

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi kwitansi atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan hasil audit dari Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk penjualan Ekspor, Antar Pulau diluar wilayah Kabupaten Mimika saat membayar pajaknya kecuali ditentukan lain.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang melakukan penjualan lokal (truck) dalam wilayah Kabupaten Mimika wajib melampirkan data penjualan.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang telah melapor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, pelayanan Bea Cukai dan Adpel Kabupaten Mimika bilamana jadwal keberangkatan tidak sesuai dengan jadwal semula (terjadi kerusakan teknis) agar melaporkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika selambat-lambatnya 3 (tiga) hari untuk melakukan konfirmasi dengan melampirkan surat pengajuan pembatalan dan persetujuan pembatalan dari Kantor Bea Cukai serta melampirkan perubahan laporan surveyor yang bersangkutan dan bukti pembatalan PIB dari Bea Cukai.
- (6) Terhadap perubahan jadwal keberangkatan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika akan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan.

## BAB XII

### PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Mimika.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

## BAB XIII

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 15

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika berwenang melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Mimika.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama  
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
  - a. Pengoperasian usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. Izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Pemilikan masa berlaku izin;
  - b. Aspek operasional dari fasilitas pertambangan;
  - c. Aspek pembukuan, bill dan nilai jual bahan galian; dan
  - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## Bagian Kedua

### Penertiban

#### Pasal 21

- (1) Penertiban usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Mimika dan instansi terkait terhadap :
  - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
  - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
  - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
  - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah; dan
  - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian .
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika setelah dikoordinasikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lainnya.

- (4) Penyegehan terhadap usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
  - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian; dan
  - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atas nama Bupati Mimika dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 23

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk;

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan; dan
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku;

#### Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atas nama Bupati Mimika.
- (2) Biaya penyitaan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Bupati Mimika.
- (3) Penyitaan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan Dinas/instansi terkait

### BAB XVI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk.I

NIP. 19640616/199403 1 008